

POLITIK IDENTITAS:**Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila****Leli Salman Al-Farisi**

FISIP Universitas Wiralodra, Indramayu

Email: salmanpolpum@yahoo.co.id

ABSTRAK:

Makalah ini akan mendeskripsikan secara singkat tentang fenomena Politik Identitas yang masih perlu dicarikan landasan teoritisnya agar bisa menjelaskan secara ilmiah, mengontrol dan meramalkan apa yang sedang terjadi serta apa yang seharusnya terjadi, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu, sebelum mendiskusikan lebih lanjut tentang Politik Identitas, perlu ditelusuri lagi tentang hubungan antara agama dan politik. Berdasarkan hasil analisis sederhana atas beberapa teori politik dan fakta sosial yang terjadi di Indonesia pasca reformasi, dihasilkan ringkasan beberapa ancaman dan bahaya penyalahgunaan Politik Identitas bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan NKRI sebagai Negara Pancasila.

Kata kunci: Politik Identitas, Agama, Teori Politik, Fakta Sosial, dan Negara Pancasila.

PENDAHULUAN

Kondisi aktual kehidupan politik kebangsaan saat ini telah mendorong kesadaran semua pihak untuk melakukan upaya nyata untuk melakukan penegasan dan peningkatan pemahaman kembali nilai-nilai kebhinekaan dalam bingkai Pancasila sebagai dasar Negara, karena berdasarkan sejarah bangsa Indonesia telah terbukti bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang plural, dan bangsa yang memiliki kemampuan serta daya tahan untuk menjaga keharmonisan dalam keberagaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat dan Agama melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dinamika global saat ini negara-negara di belahan dunia lain terutama di kawasan Timur Tengah, Eropa, bahkan di Amerika sedang menghadapi krisis keamanan, krisis politik dan sosial yang berkepanjangan, terjadi perang saudara dengan membawa simbol-simbol agama, terorisme, kejahatan kemanusiaan, serta krisis ekonomi yang mengancam stabilitas negara. Namun sampai saat ini, Indonesia yang kita cintai masih tegak berdiri sebagai bangsa dan negara yang berdaulat dalam kerangka NKRI berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan amanat TAP MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 mengamanatkan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara harus segera dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Hal ini bermakna bahwa setiap warga negara, apalagi para penyelenggara negara dan pemerintahan, wajib memahami Pancasila secara utuh dan menyeluruh (*kaffah*) dan mampu untuk mengimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, akan dapat diwujudkan oleh bangsa Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awalnya dibentuk dengan satu komitmen untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang menyatukan segala perbedaan alamiah bangsa Indonesia, dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas di NTT (Nusa Tenggara Timur). Dialektika tentang komitmen dasar berbangsa yang satu telah dilakukan secara elegan melalui pendekatan rasionalitas dan emosionalitas, bahkan spiritualitas (kajian dan perenungan agama melalui ritualitas para ulama dan agamawan) bersama-sama para pemikir dan pejuang kemerdekaan. Keanekaragaman identitas suku bangsa, etnis, agama, hingga adat istiadat, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, namun bisa menjadi potensi

persoalan jika perbedaan di dalamnya tidak berhasil dikanalisis dalam satu prinsip dasar kebangsaan yang mampu menjadi pijakan hidup bersama dalam suatu negara bangsa yaitu NKRI (Indonesia untuk semua). Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digali dari nilai-nilai luhur kebangsaan yang hidup, tumbuh dan berkembang pada akar kebudayaan suku-suku bangsa yang mendiami Nusantara dan telah disepakati menjadi pondasi dasar berdirinya NKRI. Pancasila merupakan dialektika dari sistem dan konsep kebangsaan yang ada dalam sejarah dunia (demokrasi ala barat “liberalisme”, negara agama, monarki, juga sosialisme).

Sebagai dasar negara, Pancasila lahir dari buah pikir bersama anak bangsa berjiwa “negarawan” yang diwakili oleh para politisi, intelektual, agamawan dari berbagai macam latar belakang suku bangsa dan agama. Pancasila dirumuskan, didialogkan, diperdebatkan, dibangun, dijaga bersama dan diperuntukkan untuk seluruh tumpah darah Indonesia. Pancasila menjadi perekat persatuan dan kesatuan nasional dalam berfikir (*to think*), timbang rasa sesama anak bangsa (*to understanding*) dan berkarya sesama anak bangsa (*to do*), serta merupakan kesepakatan agung (*great national agreement*) yang menjadi landasan, arah, rambu-rambu dan tujuan dari NKRI. Dengan demikian, maka Pancasila sudah seharusnya menjadi milik bersama sebagai sesama anak bangsa, tidak boleh ada klaim-klaim yang merasa “paling” Pancasila. Semua harus merasa memiliki Pancasila, tidak ada skat-skat SARA, dukungan politik, bahkan dalam posisi sebagai “pengusa” (rezim pemeritahan) pun bukan lagi penafsir tunggal atas Pancasila.

Politik identitas seharusnya dapat dilebur menjadi politik kebangsaan, politik negara yang tidak lagi mengedepankan egoisme sektoral, egoisme kelompok, egoisme partikularistik karena politik kebangsaan, politik kenegaraan, dan politik nasionalisme yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pengejawantahan dari politik kebhinnekaan yang didalamnya terikat keragaman tapi untuk kesatuan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesepakatan untuk memastikan bahwa Indonesia adalah milik bersama, menghapus prinsip dominasi atas apapun, Kesetaraan dalam kemanusiaan, keamanan dan kesejahteraan umum bagi semua orang, kedamaian atas prinsip tepo seliro yang didasarkan kepada ideologi Pancasila yang akan memayungi keragaman dalam politik kebangsaan dan politik kenegaraan bagi seluruh warga negara tanpa ada labelisasi yang bernuansa SARA.

Politik Identitas Mengancam Persatuan dan Kesatuan NKRI

Politik Kebangsaan Pancasila yang bersifat multikultur secara konseptual memiliki makna sebagai anti tesis dari praktik politik identitas yang bersifat partikularistik. Politik *divide et empera* (pecah belah) yang pernah digunakan oleh kaum kolonial Belanda pada sejarah perjuangan kemerdekaan tidak lain adalah menggunakan pola-pola dan metode praktik politik identitas sebagai cara efektif melemahkan kekuatan nasional untuk melawan kaum kolonial saat itu. Demikian pula di dalam sejarah konflik-konflik politik aktual di dunia, konflik atas politik identitas terjadi di berbagai bangsa. Jejak jejak konflik atas dasar politik identitas dapat kita pelajari di beberapa negara Eropa dan Asia seperti di Skotlandia antara Katolik melawan Protestan sebagai bagian dari konflik di wilayah Great Britania. Perang saudara di Amerika Serikat ketika terjadi pada era *Civil War*, konflik pribumi dan non-pribumi di Semenanjung Malaya, pecahnya Yugoslavia, Suriah, Afghanistan, maupun politik anti Semit serta merebaknya terorisme, radikalisme di berbagai belahan dunia. Politik identitas dilebur menjadi politik kebangsaan yang tidak lagi mengedepankan egoisme sektoral, egoisme kelompok, egoisme partikularistik. Tidak terlalalu berlebihan jika pada akhirnya akan muncul “kecurigaan” kalau penyebaran virus politik identitas sebagai bentuk strategi global untuk melumpuhkan kekuatan-kekuatan yang dianggap akan mengancam eksistensi dominasi sosial, politik dan ekonomi meraka.

Potret sejarah konflik politik atas dasar identitas tersebut menjadi pelajaran berharga bagi perjalanan bangsa Indonesia bahwa persatuan dan kesatuan nasional dapat terpecah belah ketika politik identitas tidak dapat di kelola secara efektif, dikanalisaasi bahkan harusnya di cegah. Periode reformasi telah berjalan hampir dua dekade, yang telah membawa perubahan baik secara prosedur maupun substansi pada kualitas berdemokrasi. Namun, pesta demokrasi lokal pertarungan politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu telah meninggalkan beberapa catatan penting tentang fenomena kemunculan Politik Identitas yang akan problem mendasar dalam sistem demokrasi yang sedang kita tata bersama saat ini. Pada tahun 2019 ini, Indonesia telah melaksanakan Pemilu serentak yang untuk pertama kalinya dalam sejarah akan memilih Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan proses pemilihan wakil-wakil rakyat di DPR RI, DPRD, DPD. Kegaduhan politik nasional telah diwarnai dengan merebaknya berbagai Isu-isu partikularistik tentang pribumi dan non pribumi, Islam dan non Islam, China vs anti China, Khilafah Islam vs Pancasila merebak dan menjadi lumrah dibahas, digagas, dihembuskan dalam konstestasi kekuasaan di daerah maupun nasional dengan dalih demokrasi. Politik negara dan kebangsaan berdasarakan ideologi Pancasila yang menjadi kesepakatan bangsa telah dinapikan demi kepentingan elektoral dalam usaha untuk meraup sentimen pemilih. Padahal, banyak sekali isu substansi lainnya yang seharusnya menjadi "Tema Sentral" untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang belum tuntas, lebih layak dan lebih elegan untuk dijadikan bahan perdebatan sebagai bentuk kritik atas realitas politik kenegaraan dan kebangsaan yang sangbat mendesak untuk menjadi agenda para pejabat politik ke depan.

Era reformasi ini telah menjebak kita dalam praktik demokrasi liberal (liberalisasi politik) hampir tanpa batas bahkan tanpa araha tujuan yang cukup jelas, melalui penerapan sistem multipartai dan pemilihan langsung melahirkan hak kebebasan politik di satu sisi, tetapi juga berpotensi melahirkan anarki sosial bahkan anarki bangsa di sisi lainnya. Individu dan kelompok dengan berbagai latar belakang asik memainkan isu-isu identitas sebagai komoditas politik kekuasaan dan mengabaikan politik kenegaraan dan kebangsaan berdasarkan ideologi Pancasila. Pembeneran atas logika politik cara berfikir identitas yang terlalu sempit telah digunakan tanpa mengindahkan rasa tepo seliro (*to understanding*), yang pernah dilakukan para pendiri bangsa saat berjuang dan bekerja, berdialektika merumuskan, menyepakit dan menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Penyimpangan penggunaan Politik Identitas yang coba digunakan oleh beberapa elit politik dari kelompok-kelompok yang telah dipangaruhi nilai-nilai serta menganut faham-faham yang datang dari luar untuk kepentingan jangka pendek dan sekaligus untuk mewujudkan ilusi-ilusi politik mereka yang telah lama terkubur.

Lahirnya bangsa dan negara Indonesia tidak saja melalui proses rasional (berfikir), fisik (berkerja dan berperang) tetapi juga melalui proses tepo seliro (merasakan dengan batin), bahwa kita adalah satu bangsa dengan keragaman (negara dan bangsa multikulturalisme) diantaranya keragaman etnis, suku dan agama. Politik identitas secara luas tanpa batas merupakan "*abuse of Indonesia democracy*" dan rawan melahirkan berbagai problem keamanan bahkan dapat mengancam keutuhan nasional Indonesia. Politik identitas menghidupkan kembali pengkotakan, sekat-sekat atas dasar SARA yang sejatinya telah diserap dalam jiwa Pancasila yang telah disepakati dan diterima sebagai pijakan, landasan, dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara oleh para pendiri Republik ini.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh CSRC (*Center for the Study of Religion and Culture*) pada tahun 2010, **Noorhaidi Hasan** dan **Irfan Abubakar** (2011: 1-2) menjelaskan temuannya bahwa Muslim yang terpapar oleh pelbagai informasi keislaman di ragam media sebgaiannya besarnya (80%) cenderung menjadiklan Islam sebagai bagian dari ekspresi etika dan kebudayaan, sedangkan selebihnya (20%) menginginkan Islam lebih jauh menjadi ideologi

politik. Di kalangan mereka yang tergolong Islamis, tidak banyak jumlah yang benar-benar aktif menyokong ideologi Islam politik (5%). Dengan demikian kalau mengacu kepada hasil temuan riset ini, dapat dikatakan bahwa terdapat kemungkinan 20% dari penduduk muslim di Indonesia mendukung praktik-praktik Identitas Politik Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar (mungkin kurang signifikan), namun gambaran besaran angka tersebut harus tetap menjadi “perhatian” kita karena dinamika politik pasca reformasi serta kemungkinan besarnya pengaruh dari dinamika politik global dapat dengan cepat mengubah peta kekuatan Islam Politik di Indonesia serta menjadi ancaman paling mungkin terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

A. LANDASAN TEORITIS

Terminologi Politik Identitas yang semakin populer akhir-akhir ini merupakan kelanjutan dari kerancuan teoritis tentang hubungan Agama dan Politik dalam kajian keilmuan, di mana dinamika praktisnya selalui melampaui kecepatan kajian-kajian dan diskusi-diskusi akademis tentang konsepsi tersebut. Fenomena Politik Identitas masih perlu dicarikan landasan teoritisnya agar bisa menjelaskan secara ilmiah, mengontrol dan meramalkan apa yang sedang terjadi serta apa yang seharusnya terjadi, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita mendiskusikan lebih lanjut tentang Politik Identitas, perlu ditelusuri lagi tentang hubungan antara agama dan politik, dimana menurut **Haryatmoko** (2010: 84-85) menjelaskan bahwa upaya memahami kaitan agama dan politik menyentuh *tiga mekanisme pokok* yang membutuhkan: kerangka penafsiran religius terhadap hubungan sosial (fungsi ideologi), agama sebagai faktor identitas, dan legitimasi etis hubungan sosial. **Pertama**, fungsi *agama sebagai ideologi*: agama menjadi perekat suatu masyarakat karena memberi kerangka penafsiran dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial. Sejauh mana suatu tatanan sosial dianggap sebagai representasi religius, yang dikehendaki Tuhan. **Kedua**, *agama sebagai faktor identitas* dapat didefinisikan sebagai kepemilikan pada kelompok sosial tertentu. Kepemilikan ini memberi stabilitas sosial, status, pandangan hidup, cara berpikir, ethos. Ini menjadi lebih kental lagi bila dikombinasikan lagi dengan identitas etnis: Aceh Muslim, Flores Katholik, Bali Hindu. Pertentangan etnis atau pribadi bisa menjadi konflik antar agama. Faktor identitas ini sekaligus berfungsi sebagai kapital sosial bila dilihat dari perspektif Bourdieu karena merupakan jejaring atau sumber daya berkat kepemilikan pada agama yang sama, lalu menjadi faktor perekat yang bisa menumbuhkan kepercayaan dan solidaritas, meski di sisi lain juga bisa menjadi alat diskriminasi. **Ketiga**, *agama menjadi legitimasi etis hubungan sosial*. Berbeda dengan agama sebagai kerangka penafsiran, mekanisme yang ketiga ini bukan skarisasi hubungan sosial, tetapi sustau tatanan sosial mendapat dukungan dari agama. Dalam konteks ini, formalisme agama menjadi unsur penting di dalam penghayatan karena terkait dengan masalah pengakuan sosial dan kebanggaan pada kepemilikan kelompok. Maka butuh penamaan sustau sistem sosial, ekonomi atau budaya dengan jargon-jargon agama akan semakin meningkatkan fanatisme pemeluknya.

Para pemikir seperti Ania Loomba, Homi K. Bhabha dan Gayatri C Spivak merupakan para pakar yang mendalami tentang terminologi Politik Identitas dan Nasionalisme. Kontribusi mereka dalam hal ini adalah telah meletakkan politik identitas sebagai ciptaan dalam wacana sejarah dan budaya. Sedangkan dalam literatur Ilmu Politik, politik identitas betul-betul dipilah, sehingga terlihat perbedaan yang jelas tentang apa itu politik identitas (*political of Identity*) dan apa itu identitas politik. Identitas politik merupakan sebuah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek, di dalam ikatan suatu komunitas politik. Adapun politik identitas akan mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik itu dalam identitas politik maupun identitas sosial yang menjadi sumber dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19).

Menjelang pesta demokrasi akbar yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 di Indonesia melalui agenda besar bernama PEMILU serentak saat ini, sangat dipahami bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik kian vulgar terlihat dalam praktik politik kekinian. Sebenarnya menurut pendapat **Donald L Morowitz** (1998), Pakar Ilmu Politik dari universitas Duke telah mendefinisikan **Politik Identitas** sebagai pemberian garis yang sangat tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Garis penentuan tersebut tentu akan tampak tidak dapat dirubah. Karena itu maka status baik sebagai anggota dan bukan anggota akan terlihat bersifat permanen. Sedangkan para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas lainnyapun, telah mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional. Sebut saja **Agnes Heller** misalnya, yang telah mendefinisikan **Politik Identitas** adalah sebagai sebuah gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah pada suatu perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama.

Agnes Heller (Abdillah, 2002: 22) menggambarkan terkait politik identitas dalam hal ini sebagai politik, yang difokuskan pada suatu pembedaan, dimana sebagai kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (*free play*) walaupun pada akhirnya akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Pada akhirnya politik identitas juga dapat mencakup *rasisme*, *bio-feminisme*, *environmentalism* (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis.

Bagaimana Nasionalisme berperan dalam praktik politik? Dalam hal ini bahasan terkait nasionalisme dalam perspektif antropologi, sebagaimana yang dikutip dalam **Gellner** (1983), bahwa nasionalisme didefinisikan sebagai sebuah ideologi yang beranggapan bahwa tapal-tapal batas budaya mesti bersepadanan dengan tapal-tapal batas politik, artinya bahwa negara harus mencakup hanya orang yang "berjenis sama". Nasionalisme muncul sebagai akibat dari tanggapan terhadap industrialisasi dan keterceraian orang-orang dari rupa-rupa ikatan primordial kepada kekerabatan, agama dan komunitas lokal. Dalam catatan sejarah Indonesia dikatakan, bahwa peran ideologi nasionalisme dalam politik di Indonesia, dimulai oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi Budi Utomo. Melalui Organisasi inilah kemudian dipandang sebagai lambang kelahiran kesadaran nasionalisme di antara kaum pribumi dengan mencetuskan "Sumpah Pemuda" sebagai suatu komitmen politik mengaspirasikan semangat nasionalisme mereka.

Politik Identitas di Indonesia, sebagaimana dikutip dari **Syafii Ma'arif** dalam bukunya "*Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*", menjelaskan bahwa khususnya di Indonesia, Politik Identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing (Ma'arif, 2012: 55). Gerakan pemekaran daerah dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas tersebut. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik mereka, sehingga lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, merupakan masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan.

Tentu berbeda dengan pemahaman sejarah nasionalisme di Indonesia dahulu, yang awal mulanya merupakan sebuah ideologi, sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme yang dimulai dengan penerbitan koran Medan Prijaji milik pengusaha pers dan jurnalis pribumi pertama R.M. Tirtoadisoerjo. Sikap kritisnya selalu dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan yang tentu banyak membuat para pejabat-pejabat Hindia Belanda geram, begitupun pengungkapan-pengungkapan skandal-skandal korupsi di lingkungan birokrasi kolonial. Akibatnya, tahun 1912 surat kabar ini dilikuidasi dengan alasan utang dan penipuan, dan

Tirtoadisoerjo dibuang ke Ambon. Berbeda halnya di Era politik kontemporer saat ini, politik identitas mengancam sikap nasionalisme dan pluralisme yakni sebuah realitas kegamangan yang dialami bangsa Indonesia terkait menguatnya politik identitas. Oleh karena itu, bila dilacak dari sejarah Indonesia, politik identitas yang muncul cenderung bermuatan etnisitas, agama dan ideologi politik. Terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikulturalisme, maka politik identitas dapat menjadi bahan kajian yang menarik untuk ditelaah jika dihubungkan dengan penguatan nasionalisme bangsa.

Baik Agnes Heller maupun Donald L Morowitz memperlihatkan sebuah benang merah yang sama yakni politik identitas dimaknai sebagai politik perbedaan. Konsep ini juga mewarnai hasil Simposium Asosiasi Politik Internasional di Wina pada 1994. Kesan yang lain dari pertemuan Wina adalah lahirnya dasar-dasar praktik politik identitas. Sementara **Kemala Chandakirana** (1989) dalam artikelnya *Geertz dan Masalah Kesukuan*, menyebutkan bahwa: Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki

kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi—alat untuk menggalang politik—guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya”. Pemaknaan politik identitas antara Kemala dengan **Agnes Heller** dan **Donald L Morowitz** sangat berbeda. Kemala melangkah lebih jauh dalam melihat politik identitas yang terjadi pada tataran praktis. Yang biasanya digunakan sebagai alat memanipulasi—alat untuk menggalang politik guna kepentingan ekonomi dan politik. Namun, pada bagian yang lain, argumen Kemala mengalami kemunduran penafsiran dengan mengatakan bahwa: Dalam politik identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik. Pemahaman ini berimplikasi pada kecenderungan untuk: *Pertama*, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya. *Kedua*, demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. *Terakhir*, kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya.

Selain tiga kecenderungan di atas **Klaus Von Beyme** (dalam Ubai Abdillah, 2002) menyebutkan ada tiga karakteristik yang melekat pada politik identitas, yakni; Gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali “narasi besar” yang prinsipnya mereka tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan-perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya; Dalam gerakan politik identitas ada suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik.

Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar; Kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok teori spesifik dari ilmu. Sebagai contoh, tidak seorangpun yang bisa menolak bahwa seorang hitam atau seorang sarjana wanita bisa jadi telah mempunyai pengalaman yang membuat mereka sensitif dalam kasus-kasus tertentu menyangkut hubungan dengan kelompok yang lain. Dari tiga kriteria tersebut, selanjutnya **Von Beyme** (dalam Ubed Ubdillah, 2002) membuat analisis lanjutan dengan melihat politik identitas melalui pola gerakan, motivasi dan tujuan yang ingin dicapai.

Akar Sejarah Politik Identitas di Indonesia

Jika bangunan pikir **Prof. Henk S Nordholt** (2007) diikuti sudah barang tentu kesimpulannya akan berkata bahwa *politik identitas merupakan bentukan dari Negara Orde*

Baru. Pandangan ini senada dengan Rachmi Diah Larasati yang mengatakan bahwa '*negara sangat berperan dalam pembentukan politik identitas*'. Dua pandangan menguatkan pemahaman kita bahwa politik etnisitas merupakan kreasi negara yang monumental dalam rangka pelabelan warga negaranya. Pelabelan ini menjadi penting dalam urusan politik pengaturan atau bisa juga sebagai politik kontrol negara terhadap warganya untuk mengetahui 'siapa lawan' dan 'siapa kawan'. Pengaturan dan kontrol negara terhadap warganya tidak berhenti sampai di sini.

Menurut pandangan **Henk** (2007) ada empat kebijakan yang dijalankan Orde Baru untuk melemahkan politik etnisitas di tanah air. *Pertama*, tidak ada daerah yang asli. Maksud semua daerah terbuka sebagai daerah migrasi maupun transmigrasi sehingga semua komunitas tercerabut dari akar sosio-kultural dan politiknya. *Kedua*, pemerintah Orde Baru menghindari terbentuknya kelas karena itu persoalan SARA dikontrol sedemikian ketat. Dan yang berhak menggunakan SARA hanya pemerintah dalam menjastifikasi kelompok mana yang bersalah dan dikucilkan relasi sosial-politiknya. *Ketiga*, modernisasi dijalankan supaya pengaruh etnis dan agama merosot. *Keempat*, negara mengatur supaya jangan ada yang tumpang tindih antara agama dan suku. Karena dengan cara ini persatuan tidak pernah ada dan pemerintah pusat tidak terancam.

Keempat kebijakan diatas, mempunyai implikasi politis yang sangat besar dalam pengelolaan relasi pusat dengan daerah, pemerintah dengan rakyatnya. Karena itu gairah etnisitas dan agama tidak lagi menjadi tempat orang mengespresikan diri secara politik dan mengungkapkan diri secara budaya, tetapi akan berubah menjadi tempat orang menyembunyikan diri secara politik dan mencari keamanan diri secara budaya. Pilihan politik maupun budaya masyarakat menutup diri merupakan jalan terbaik dalam mengikuti jejak langkah politik kekuasaan Orde Baru. Karena itu ketika Negara sudah mengalami pelemahan basis materialnya maka masyarakat meminjam istilah **Henk** (2007) mencari *perlindungan pada kelompok agama maupun etnisitas*. Pencarian perlindungan masyarakat kepada etnisitas maupun agama cepat atau lambat akan membahayakan posisi pemerintah dalam bangunan relasi vertikalnya tetapi juga rawan, rentan, penuh resiko dan sangat berbahaya dalam relasi horizontalnya. Ternyata, dugaan ini benar adanya. Aneka konflik yang terjadi di ranah lokal, pada 1995-an hingga Orde Baru rontok membuktikan betapa dahsyatnya kekerasan politik di tanah air.

Benturan yang bernuansa Politik Identitas tidak hanya mempermalukan para penguasa tetapi juga para cendekiawan-ilmuwan yang selama ini merasa optimis bahwa agama, ras dan suku bangsa akan segera hilang kekuatannya karena sudah mengalami pencerahan dan kemajuan. Pada kenyataannya optimisme itu meleset karena mereka lupa bahwa sentimen-sentimen primordial yang sejak semula telah ada dan akan selamanya tetap bertahan—bahkan identitas kelompok akan mengguncang tatanan politik yang selama ini diduga kokoh bangunannya.

Apabila kita merujuk pada pengamatan **Lucian W Pye** (1993) terbukti, goncangan politik karena ledakan politik etnisitas sudah kita rasakan pengaruhnya. Kecurigaan bahwa negara tidak hadir/absen dalam melindungi warganya. Hal ini nampak dalam peristiwa yang memilukan pertikaian Dayak-Madura, peristiwa kekerasan politik Mei 1998 di Jakarta, pengusiran etnis Buton-Bugis dan Makassar (BBM) di Ambon. Selain berbau kekerasan sebagaimana dijelaskan di atas politik etnisitas juga hadir dan mengental dalam era politik desentralisasi. Pencarian politik etnisitas, baik kolektif maupun individual menjadi sumber paling mendasar dan bermakna untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di daerah. Karena itu, para politisi di daerah sedang sibuk membangun masa lalu yang mereka miliki, lalu energi mereka kerahkan untuk memproyeksikan bangunan masa lalu itu ke masa depan guna

memperkuat rasa dan perasaan atas etnisitas mereka. Dengan demikian, gerakan dapat “diperluas” dan “dilestarikan” dengan pagar-pagar pembatas untuk dapat dirayakan sembari menjaga jarak dengan orang lain yang berbeda dengan mereka. Realitas empiris dari gerakan politik etnisitas menemukan relevansinya di beberapa daerah, misalnya politik etnisitas yang mengandalkan mobilisasi massa dengan tujuan akhir adalah perampasan kekuasaan muncul dalam mengiringi politik desentralisasi dengan lahirnya konsepsi putra daerah.

B. POLITIK IDENTITAS DAN KEUTUHAN NKRI

Azyumardi Azra (2019: xiv-xvii) dalam pengantar buku yang ditulis oleh Burhanuddin Muhtadi tentang *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral*, menjelaskan bahwa populisme politik hampir sepenuhnya muncul dan berkembang hanya di negara-negara demokrasi. Fenomena populisme politik nyaris tidak muncul di negara otoriter yang tidak memberikan ruang bagi wacana, konsep dan gerakan anti-kemapanan, yang mengancam status-quo kekuasaan rejim otoriter. Begitu juga di Indonesia, populisme politik identitas Islam muncul belakangan ini berkat demokrasi sejak 1999. Lebih lanjut, digambarkan juga wacana dan persepsi mereka tentang populisme politik Islam terkait dengan keberhasilan kelompok Islamis mengalahkan pasangan Cagub-Cawagub Ashok-Djarot dari Cagub-Cawagub Anis-Sandi. Bagi mereka kemenangan Anies-Sandi merupakan kemenangan populisme politik identitas Islam yang tengah bangkit dan dapat terus menemukan momentumnya dalam Pilkada 2016/2017 dan selanjutnya Pileg dan Pilpres 2019. Lebih jauh, kebangkitan populisme politik Islam terkait dengan sejumlah aksi massa kalangan Muslim Indonesia. Untuk itu perlu diingat kemabli, gelombang aksi, yang juga disebut Aksi Bela Islam, bermula dengan aksi 14 Oktober 2016 (1410), 28 Oktober 2016 (2810), 4 November 2016 (411), 2 Desember 2016 (212), 11 Februari 2017 (112), 21 Februari 2017 (212 jilid 2), 31 Maret 2017 (313), dan aksi 5 Mei 2017 (Aksi 55).

Menurut **Solahuddin Wahid** dalam tulisannya berjudul “*Keindonesiaan dan Ke-Islaman*” (Kompas, 16 Mei 2017), Konflik keindonesiaan dan keislaman itu mungkin meluas pada Pilkada 2018. Kalau pada Pilpres 2019 konflik semacam itu masih terjadi, hal itu berpotensi mengancam persatuan Indonesia. Perlu ada upaya untuk meredamnya. Perlu dilakukan dialog antarkelompok di dalam Islam maupun dengan kalangan agama lain untuk meredamnya. Dalam dialog itu perlu dibahas dengan rinci apa yang dimaksud dengan “politisasi agama”, apa yang dimaksud dengan “isu SARA” (suku, agama, ras, dan antargolongan). Dialog itu harus dilakukan dengan hati dan kepala dingin supaya dapat menghasilkan kesepakatan yang bisa diikuti dalam praksis sehari-hari. Memang perlu waktu yang cukup untuk bisa mendinginkan suasana.

Berdasarkan hal tersebut, **Muhtadi** (2019:10) menegaskan bahwa fenomena Politik Identitas yang dikemas dalam populisme Islam kalau berada di tangan para pemimpin dan politisi yang tidak berani melawan arus, populisme tersebut akan berubah menjadi “**racun**” yang akan membunuh demokrasi secara perlahan, tapi pasti. Bukan lagi sebagai “**madunya**” demokrasi yang selama ini telah menjadi ilusi bagi mereka yang tidak memahami hakekat bahaya dan ancaman politik identitas bagi keberlangsungan serta keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Apabila menggunakan analisa peranan agama dalam membentuk hubungan sosial, menurut pendapat **Haryatmoko** (2010: 101), bahwa agama dalam penannya membentuk identitas membantu pemeluknya merasakan kepemilikan pada kelompok sosial tertentu. Kepemilikan ini memberi stabilitas sosial, status, cara berpikir, dan etos. Dalam konteks ini, pertentangan pribadi bisa berubah menjadi konflik agama. Sebabnya karena identitas agama sebagai representasi diri tidak bisa dilepaskan dari masalah harga diri, martabat dan kebanggaan. Tekanan agama pada peran ideologi semakin memperkuat representasi diri, yang

pada gilirannya, bisa digunakan untuk mengkristalkan dukungan untuk membela kepentingan. Maka, H. Arendt mengingatkan: “Kita tergoda untuk mengubah dan menyalahgunakan agama menjadi ideologi, dan menodai usaha yang telah kita perjuangkan melawan totalitarisme dengan suatu fanatisme. Padahal fanatisme adalah musuh besar kebebasan”.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, **Nasaruddin Umar** (2019: 283-302) mengingatkan kita semua agar selalu mewaspadaai “disfungsi agama”, antara lain seperti upaya-upaya *desakralisasi agama* yaitu upaya penghilangan kesakralan dan kesucian nilai-nilai agama. Selain itu, disfungsi agar ditandai juga dengan *melemahnya peran agama*, yang ditandai dengan: ketika agama hanya disektor hilir, ketika agama kehilangan daya jihad, ketika agama tidak lagi mencerahkan, agama kehilangan fungsi kritis, stagnasi pemikiran agama, dan ketika pertimbangan agama termarginalisasi.

Menjelang masuknya abad ke 21, termasuk di Indonesia pasca reformasi ini ditandai dengan fenomena yang penuh kejutan bahkan tidak terduga dalam kehidupan politik dan kebangsaan. Sebagaimana **Ariel Heryanto** (2019: 1) dalam hasil penelitiannya tentang “*Politik Identitas dan Kenikmatan dalam Budaya Layar Mutakhir di Indonesia*” menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya kelas menengah muda perkotaan, mencoba merumuskan ulang identitas mereka pada dekade pertama abad ke 21. Ini adalah masa yang tidak terduga, penuh dengan janji akan kebebasan tapi juga, pada saat yang sama, ketakutan. Masa ini juga ditandai oleh beberapa hal seperti: peningkatan politik Islami yang belum pernah sedahsyat ini, perdebatan publik tentang pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, perpecahan yang berkepanjangan dan tak terdamaikan di kalangan elite politik, bangkitnya kekuatan ekonomi Asia, serta revolusi komunikasi digital yang disambut secara bergairah oleh kaum muda di seluruh dunia.

Bahaya Politik Identitas dalam konstek politik global, dapat kita mengambil pelajaran dari sejarah kekejaman politik yang dilakukan oleh Hitler dan NAZI menjadi berkuasa di Jerman. Ialah eksploitasi politik identitas. Baik dengan mengglorifikasi bangsa arya dan mensetankan orang yahudi. Padahal ya soal identitas ini sifat inheren sesuatu hal yang tidak bisa kita pilih-pilih. Bahkan agama sekalipun, ada beberapa orang yang gak menjalankan agama nya dengan baik namun meyakini agama tetap menjadi identitas dirinya. Sehingga disini lah problem dari politik identitas tersebut.

Identitas sebagai politik pada dasarnya tidak masalah, karena itu bagian dari realita dari mana kita berasal, yang menjadi problem dikala identitas ini di amplifikasi, dimanipulasi untuk target-target politik sembari membenturkan dengan identitas lawan. Padahal kita hidup dalam sebuah pluralitas atau kemajemukan yang tidak bisa kita hindari. Dan kita juga tidak hidup dalam logika zero sum, bila yang satu menang maka yang lain kalah sebagaimana apa itu politik terbuka. Dan yang paling berbahaya ialah politik identitas bisa mengesampingkan rasionalitas, dari hal ini akan banyak sekali rentetan akibat nya, bisa kebijakan yang tidak tepat, kebijakan yang sekadar populis.

Syamsuddin Haris (2014: 51) menggambarkan dengan gamblang tentang bahaya disitegrai bangsa dalam tulisannya berjudul “*Salah Urus Negara dan Rapuhnya Keindonesiaan*”. Menurutnya, potensi konflik dan disintegrasi berakar pada kecenderungan elit politik di hampir semua tingkat untuk memanipulasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Lebih jelas lag, potensi disintegari itu muncul ketika elita politik, terutama elite birokrasi negara (sipil dan militer), memanipulasi kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok sebagai kepentingan “nasional” serta menyalahgunakan otoritas negara untuk melindungi dan mempertahankan *vested interest* semacam itu. Fenomena itulah tampaknya yang lebih relevan dalam melihat berbagai kasus empiris yang berkaitan dengan soal integrasi dalam periode Orde Baru dan

potensi disintegrasi pasaca-Orde Baru. Akibat manipulasi terus menerus yang dilakukan oleh nagara, kerusuhan 13-15 Mei 1998 berkembang menjadi kerusuhan berbaur rasial (anti-Cina). Di Ambon dan Maluku pada umumnya, konflik dipertajam oleh isu Agama yang sangat sensitif, sehingga terjadi konflik horizontal yang faktor-faktornya saling tumpang tindih sama lain, yakni antara isu representasi Islam-Kristen dalam struktur birokrasi setempat dengan soal kesenjangan sosial ekonomi antara penduduk asli dan para pendatang. Sementara itu, di Sambas, Kalimantan Barat, konflik etnik madfura dengan Melayu serta Dayak tumpang tindih dengan soal kesenjangan sosial ekonomi dia natgara kelompok etnik tersebut.

Lebih lanjut, menurut Haris (2014: 69), ketiadaan komitmen yang genuine dari para penyelenggara dan pemerintahan pada aras nasional ini berdampak pada munculnya kreativitas yang tidak selalu positif pada aras lokal. Karena itu, mengentalnya Politik Identitas pada sebagian masyarakat lokal, baik atas nama agama, etnik, ataupun daerah, bisa jadi merupakan salah satu bentuk "kreativitas" tersebut. Itu artinya, fenomena politik identitas pun beklum tgentu genuine pada dirinya. Tidak mustahil sebagian sentimen agama, etnik, dan daerah itu adalah cara instant masyarakat dan elit pada aras lokal melarikan diri dari kegagalan dan ketidakmampuan negara merumuskan Indonesia baru yang dijanjikan. Fenomena anarki dan premanisme politik yang cenderung marak akhir-akhir ini juga bisa dibaca secara demikian.

Mencertami bahaya disitegari bangsa tersebut, jelas semuanya terkait erat dengan masalah identitas. Apabila kondisi tersebut kembali dibangkitkan dengan adanya praktik-praktik Politik Identitas dalam setiap moment kehidupan politik kita, terutama dalam kontestasi politik di tingkat nasional maupun pada politik lokal sudah dapat dipastikan sulit menghindari terjadinya konflik politik yang pernah terjadi akan kembali menghantui perjalanan kehidupan politik berbangsa dan bernegara kita ke depan. Kita tidak boleh terjebak pada perangkap yang sama, hanya bangsa yang mau belajar dari sejarahnya yang akan menjadi bangsa besar dan bangsa yang kuat.

Isu-isu yang menyertai jelang pelaksanaan Pemilu menunjukkan semakin brutalnya klaim pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana cara memberi hukuman kepada yang lemah. Opini-opini menyesatkan disebar layaknya virus-virus yang siap menyerang kewarasan. Sisi universal kemanusiaan dicerabut demi mencapai hasrat kelompok. Kita seperti digiring untuk melupakan kodrat manusia yang dianugerahi identitas primordial yang personal sebagai bentuk kesempurnaan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hasil analisa sederhana atas beberapa teori dan fakta sosial politik yang terjadi, berikut merupakan ringkasan dari beberapa bahaya penyalahgunaan politik identitas bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan NKRI sebagai negara Pancasila, selengkapnyapun dapat disimak dalam uraian berikut ini:

1. Mengancam keutuhan NKRI

Saat ini ancaman terhadap keutuhan bangsa semakin mengkhawatirkan karena politik identitas yang mengedepankan identitas agama menjadi semakin mengental. Bukan hanya politik identitas, bahkan, saat ini ada kelompok-kelompok yang mulai mempersoalkan ideologi bangsa. Tentunya hal ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi keutuhan bangsa. sangat ironis, kenapa pada Pemilu 2019 ini muncul pihak-pihak yang mempersoalkan ideologi negara. Padahal dulu tidak ada, bahkan hingga era Orde Baru dan beberapa pemilu langsung di era reformasi hingga pemilu 2014 tidak ada yang mempersoalkan ideologi bangsa, pemahaman mengenai bahaya dari politik identitas di tengah masyarakat. Perlu diberikan sebab isu SARA itu menyangkut emosi massa yang sebagian bahkan tidak mengetahui fakta sebenarnya seperti contoh pelanggaran norma sosial dan contoh pelanggaran nilai nilai Pancasila.

2. Menimbulkan adu domba/perpecahan

Sejatinya politik yang mengtasnamakan identitas akan dapat membawa dampak adu domba antara pihak stud an lainnya. Terlebih lagi jika berkaitan dengan identitas baik isu agama atau personal maka hal ini akan dirasa lebih sensitive. Karena politik identitas itu sejatinya kejam dan tajam karena bisa menjerumuskan mereka mereka kedalam jurang permusuhan yang pada akhirnya akan membawa berbagai dampak yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Ancaman terhadap pluralisme

Pluralisme (bahasa Inggris: pluralism), terdiri dari dua kata plural (=beragam) dan isme (=paham) yang berarti paham atas keberagaman. Definisi dari pluralisme seringkali disalahartikan menjadi keberagaman paham yang pada akhirnya memicu ambiguitas. Pluralisme juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman (pluralitas), artinya, untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, gologan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Pluralisme mengimplikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi, sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari kepribadian seseorang dan/atau sekelompok orang.

4. Menimbulkan Polarisasi dan Pragmentasi kekuatan politik

Polarisasi isu pribumi dan non-pribumi juga tak bisa dianggap angin lalu. Memori kita masih segar mengingat kerusakan yang menelan korban jiwa tak terperikan di hari-hari jelang runtuhnya rezim Orde Baru. Isu non-pribumi dikoaar-koarkan untuk menyerang mereka yang berkulit putih dan bermata sipit, identitas yang kini sering disebut dengan istilah 'aseng'. Padahal, jika masyarakat peduli literasi dan diberikan informasi yang proporsional, akan menemukan jejak-jejak pribumi yang tak hanya dimiliki oleh satu suku atau ras saja. Deretan pejuang kemerdekaan nasional lahir dari identitas yang berbeda-beda. Jika tetap ngotot dengan sentimen pribumi, maka sesuai sejarah, kita akan kembali ke era *homo erectus* sejuta tahun silam sebagaimana hukuman bagi pelanggaran ham ringan.

5. Membawa perselisihan/Konflik

Perselisihan soal agama dan klaim ketuhanan tentu tak akan pernah selesai. Bahkan, seorang yang mengaku atheis pun pada hakikatnya tak mungkin menyangkal keberadaan Zat Ilahiah. Penjelasan yang sangat rasional dari Dostoevsky, "bila dinyatakan bahwa di alam semesta ini tidak ada Tuhan, menjadi jelaslah bahwa semua perbuatan apapun akan dibenarkan." Kalimat ini memberikan penjelasan bahwa kebenaran bisa hadir pada setiap kelompok, tapi yang berhak menentukan kebenaran universal hanya Tuhan. Artinya, untuk dimensi ketuhanan, bisa saja sekelompok orang memegang teguh kebenarannya, sama halnya dengan kelompok lain. Semua bisa benar, juga bisa salah. Sejatinya, Jika benturan identitas primordial ini terus-menerus dibiarkan, maka demokrasi kita tak ubahnya rimba belantara, yang kuat yang akan menerkam yang lemah, dan yang banyak yang akan berkuasa.

Untuk menjaga keutuhan NKRI, akibat adanya penyalahgunaan Politik Identitas (islam), maka dibutuhkan langkah strategis dalam menata hubungan dinamis antara Islam dengan Pancasila adalah melalui upaya harmonisasi. Kiranya perlu kita pertimbangkan bersama gagasan yang telah disampaikan oleh **Nasaruddin Umar** (2019: 143-193), mengupas tentang merajut harmoni Islam dan NKRI. Secara khusus memberikan penjelasan tentang harmoni Islam dan Pancasila, di mana menurutnya ada tiga konsepsi yang dapat menjadi dasar untuk melakukan harmonisasi antara Pancasila dan Islam sebagai berikut:

Pertama, Menempatkan Pancasila sebagai “*Melting Pot*”. Dalam kondisi objektif Pancasila tampil sebagai kekuatan pemersatu (*melting pot*) yang menjembatani berbagai perbedaan dan kepentingan di dalamnya. Menurutnya harus adanya interaksi dinamis---bukan indoktrinasi aktif dari penguasa--- dari realitas nilai-nilai plural tadi sekaligus melahirkan sintesa dan konfigurasi budaya keindonesiaan yang unik. Budaya keindonesiaan ini kelak menjadi wadah perekat (*melting pot*) yang efektif.

Kedua, Melahirkan “*Civil Society*” untuk mewujudkan nilai-nilai islami lebih dominan sebagai konsekuensi polupalsi umat Islam yang menduduki posisi mayoritas mutlak. Bukannya mengedepankan legal formal sebagai negara Islam sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fikih siyasah.

Ketiga, Nasionalisme Terbuka. Keragaman bahasa, budaya hingga agama yang disatukan oleh Pancasila pada akhirnya melahirkan satu konsep yang disebut nasionalisme. Nasionalisme Indonesia dapat disebut nasionalisme terbuka, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 yang di dalamnya mengatur hak-hak asasi manusia, seperti hak berserikat, hak beragama, hak berbudaya dan hak buday itu sendiri, serta mengakui hak-hak internasional dan hak-hak kemanusiaan lainnya. Nasionalisme Indonesia dipahami sebagai sebuah konsep kesatuan yang tersusun dari berbagai unsur keberagaman. Kebneragamannya diikat oleh sebuah kesatuan yang kokoh, melaluji persamaan sejarah sebagai penghuni gugus bangsa yang pernah dijajah selama berabad-abad oleh bangsa lain, dalam hal ini Belanda dan Jepang.

C. PENUTUP

Mungkinkah kita dapat membangun politik negara dan bangsa tanpa identitas? Mengakhiri tulisan pendek ini, saya mencoba membuat sintesis sederhana tentang praktik politik identitas dan kemungkinan dibangunnya konsepsi baru tentang “Politik Tanpa Identitas” sebagai respon terhadap kondisi aktual kebangsaan dan langkah-langkah yang harus kita siapkan untuk melalui semua permasalahan kebangsaan tersebut. Pluralisme bangsa Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang seharusnya dapat dikapitalisasi menjadi sumber kekuatan politik untuk membangun sistem demokrasi yang lebih kuat namun tetap harus ramah dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, penguatan ideologi negara “Pancasila” menjadi keniscayaan yang harus segera dilakukan oleh negara. Hanya dan mungkin satu-satunya jalan melalui konsepsi “Politik Kebhinnekaan” yang akan menjabarkan secara praktis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik negara dan politik kebangsaan sebagai antitesis dari Politik Identitas yang lebih rentan untuk disalah gunakan oleh elite-elite politik yang tidak memahami jiwa dan semangat nasionalisme kita.

Islam, merupakan identitas pertama dan utama yang paling rentan ‘rawan’ untuk disalahgunakan dalam praktik Politik Identitas di republik yang kita cintai ini. Simbolisme agama (Islam) dalam politik negara dan politik kebangsaan merupakan pekerjaan rumah kita bersama yang belum tuntas dirumuskan jawabannya, sejak merumuskan dasar negara di awal kemerdekaan pertarungan ‘benturan’ ideologis antara agama dan politik tidak terelakkan telah mewarnai proses kesepakatan politik untuk menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Hingga saat ini pun, Islam sebagai “kekuatan politik formal” di Indonesia masih tetap menjadi kekuatan paling dominan dalam menentukan dan/atau tidak menentukan sama sekali untuk arus dan irama politik, pembagian kekuasaan, bahkan perebutan jabatan-jabatan politik dalam Pemilu dan Pilkada. Bahkan perhelatan demokrasi Pilpres tahun 2019 ini, nuansa peretarungan hampir mengarah pada persetruan antara Islam dan Pancasila kembali terjadi bahkan hampir mencapai klimaksnya sepanjang sejarah konflik politik di republik Indonesia.

Akhirnya, untuk memenangi pertarungan politik ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan pemikiran dan langkah-langkah yang jauh lebih strategis dari negara untuk mengelola keragaman bangsa, pluralisme, dan menata kembali hubungan dinamis antara Islam dan Pancasila melalui penguatan ideologi negara dan menggelorakan kembali jiwa serta semangat nasionalisme secara lebih kreatif dan efektif. Oleh karena itu, pentingnya peran negara. Bukan hanya sekedar menghadirkan negara, tapi harus mampu menjalankan fungsi-fungsi secara aktif dalam menjaga dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penyalahgunaan praktik Politik Identitas yang cenderung dibiarkan, merupakan bukti kalau negara tidak berdaya bahkan hampir “kalah” dalam menjalankan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga pilihan kita tepat, yaitu dengan menjadikan Politik Identitas sebagai “madu” bukan sebagai “racun” dalam membangun demokrasi Pancasila demi keutuhan dan kejayaan republik ini yaitu NKRI.

REFERENSI:

- Ahmad Syafii Maarif. 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta, Democracy Project.
- Ahmad Syafii Maarif. 2018. *Islam dan Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Arie Setyaningrum. 2005. *Memetakan lokasi bagi politik identitas dalam wacana politik poskolonial dalam “Politik perlawanan”* Yogyakarta: IRE.
- Afan Gaffar. 1990. *Teori Empirik Demokrasi dan Alternatif Pemikiran tentang Pelaksanaan Demokrasi Pancasila* dalam Akhmad Zaini Abar (peny) *Beberapa Aspek Pembangunan*. Solo: Ramadhani.
- Ariel Heryanto. 2019. *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. (cetakan kelima). Terjemahan. Jakarta: PT Gramedia.
- Burhanuddin Muhtadi. 2019. *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Elektoral*. Malang: Intrans Publising.
- Donald L Morowitz. 1998. “Demokrasi Pada Masyarakat Majemuk”. Dalam Larry Diamond dan Mars F Plattner. *Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi* Bandung. ITB Pres.
- Ernest Gellner. 1983. *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Eric Hiariej dan Kristian Stoke (ed.). 2018. *Politik Kewargaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gerry Van Klinken. 2007. *Peran Kota Kecil*. Jakarta. YOI dan KITLV.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta. YOI.
- Kemala Chandakirana. 1989. “Geertz dan Masalah Kesukuan”. *Jakarta. Prisma No. 2/1989*.
- Lucian W Pye. 1993. “Pengantar”. Dalam Harold R Isaacs. *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis* Jakarta YOI.
- Muchamad Ali Safa’at. 2018. *Dinamika Negara dan Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Nasaruddin Umar. 2019. *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia.

- Noorhaidi Hasan dan Irfan Abubakar (editor). 2011. *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Religion an Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Robert Pringle. 2018. *Islam di Tengah Kebhinnekaan: Memahami Islam dan Politik di Indonesia*. (terjemahan) Jakarta: Prenada Media.
- Salahuddin Wahid. *Keindonesiaan dan Keislaman*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 16 Mei 2017.
- Syamsuddin Haris (ed.). 1999. *Indonesia di Ambang Perpecahan*. Jakarta. Erlangga.
- Syamsuddin Haris. 2014. *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siti Zuhro. 1999. "Riau dan Otonomi Daerah". Dalam Syamsuddin Haris (ed.), *Indonesia di Ambang Perpecahan*, Jakarta. Erlangga.
- Thomas T. Pureklolon. 2018. *Nasionalisme: Supermasi Perpolitikan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ubed Abdilah. 2002. *Politik Identitas Etnis*. Magelang. IndonesiaTera.
- Vedi R Hadiz. 2018. *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*. (terjemahan) Depok: Pustaka LP3ES.